

## **TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENCEGAHAN FRAUD DIINSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS KANTOR KEC. CIWIDEY)**

**Idah Rosidah<sup>1</sup>, Gunardi<sup>2</sup>, Priatna Kesumah<sup>3</sup>, Royke Bahagia Rizka<sup>4</sup>**

Program Studi Akuntansi, Politeknik pajajaran, Bandung, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

irosidah510@gmail.com<sup>1</sup>, goenhadis@gmail.com<sup>2</sup>, priatna.kusumah@poljan.ac.id<sup>3</sup>, royke.rizka1@yahoo.com<sup>4</sup>

### ***Abstract***

*This research analyzes the level of transparency, accountability practices, and effectiveness of the fraud prevention system at the Ciwidey District Office with the aim of evaluating administrative integrity and government efforts to provide quality public services. The method used is a qualitative approach through case studies with in-depth interviews with staff and office officials. The research results highlight a lack of transparency in information related to policy and finance, accompanied by a decision-making process that is not always clear. The accountability system is also not optimal in ensuring accountability for actions taken. Documentation analysis shows that the internal control system is not fully effective in preventing cases of fraud. From the results of this research, it was concluded that urgent improvements are needed in increasing information transparency, strengthening accountability practices, and optimizing fraud prevention systems. Recommendations include increasing the availability of open information, increasing awareness of responsible actions, and implementing concrete steps to strengthen internal control. Implementation of these recommendations is expected to improve the quality of public services, improve the image of government institutions, and provide a stronger foundation for the Ciwidey District Office and other government institutions in maintaining the integrity and trust of the public.*

***Keywords: Transparency; Accountability; Fraud; Government Agencies.***

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis tingkat transparansi, praktik akuntabilitas, dan efektivitas sistem pencegahan kecurangan (fraud) di Kantor Kecamatan Ciwidey dengan tujuan untuk mengevaluasi integritas administrasi dan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kasus dengan wawancara mendalam terhadap staf dan petinggi kantor. Hasil penelitian menyoroti kurangnya transparansi informasi terkait kebijakan dan keuangan, disertai dengan proses pengambilan keputusan yang tidak selalu jelas. Sistem akuntabilitas juga belum optimal dalam menjamin akuntabilitas tindakan yang dilakukan. Analisis dokumentasi menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal belum sepenuhnya efektif dalam mencegah kasus kecurangan. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa diperlukan perbaikan mendesak dalam meningkatkan transparansi informasi, memperkuat praktik akuntabilitas, dan mengoptimalkan sistem

pengecahan penipuan. Rekomendasinya antara lain meningkatkan ketersediaan informasi terbuka, meningkatkan kesadaran akan tindakan yang bertanggung jawab, serta menerapkan langkah-langkah nyata untuk memperkuat pengendalian internal. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan citra institusi pemerintah, dan memberikan landasan yang lebih kuat bagi Kantor Kecamatan Ciwidey dan institusi pemerintah lainnya dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.

**Kata kunci : Transparasi; Akuntabilitas; Kecurangan; Instansi pemerintahan.**

*Corresponding author* : irosidah510@gmail.com

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan adil adalah landasan penting untuk memastikan keadilan, kesejahteraan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Hal ini melibatkan tata kelola yang transparan dan akuntabel untuk memastikan keputusan dan kebijakan yang diambil berdasarkan prinsip-prinsip yang adil dan berkeadilan (A. Schick., 2016). Prinsip-prinsip ini memainkan peran krusial dalam menghindari potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa sumber daya publik dikelola dengan penuh integritas dan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Albrecht dkk., 2011). Transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga pemerintahan menjadi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik. Dengan menegakkan prinsip-prinsip ini, lembaga pemerintah dapat memastikan bahwa keputusan-keputusan yang dibuat dan dana publik yang dikelola dilakukan dengan penuh

integritas dan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah semakin menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai landasan utama dalam pencegahan fraud di lingkungan pemerintahan (A. Schick., 2016). Kecurangan sering kali menjadi masalah yang meresahkan di lingkungan instansi pemerintah karena lembaga-lembaga ini memiliki akses dan kendali terhadap sumber daya publik yang besar. Banyaknya dana dan kebijakan yang dikelola oleh instansi pemerintah dapat menjadi sasaran tindakan kecurangan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau manipulasi informasi. Hal ini bisa mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan masyarakat.

Tabel 1. Fraud paling merugikan di Indonesia

No	Jenis fraud	Jumlah kasus	persentase
1	Fraud Laporan keuangan	22	9,2%
2	Korupsi	167	69,9%
3	Penyalahgunaan aset/kekayaan negara & perusahaan	50	20,9%

Sumber : Survei Fraud Indonesia, 2019

Hasil survei menunjukkan bahwa korupsi adalah jenis fraud yang paling sering terjadi di Indonesia, dan ini terutama terjadi di

lembaga pemerintahan (*SURVEI FRAUD INDONESIA*, 2019). Tindak pidana korupsi, sebagian besar terdeteksi di lembaga-lembaga pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), diperkirakan ada 579 kasus korupsi yang tercatat di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah kasus sebanyak 533 kasus, meningkat 8,63% dari tahun sebelumnya. Dari berbagai kasus tersebut, sebanyak 396 orang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam negeri. Angka ini juga meningkat sebesar 19,01% dibandingkan tahun sebelumnya 2021 yaitu sebanyak 173 tersangka. Pada tahun 2022, kasus korupsi terbanyak terjadi di sektor desa yaitu sebanyak 155 kasus. Angka tersebut mewakili 26,77% dari seluruh kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum pada tahun 2022 (Dimas Bayu., 2023).

Penting untuk dipahami bahwa kecurangan dalam instansi pemerintah tidak hanya bersifat finansial, namun juga dapat mengganggu proses pengambilan keputusan yang seharusnya dilakukan secara adil dan transparan. Kecurangan dapat mengganggu integritas dan legitimasi lembaga pemerintah, merusak kepercayaan masyarakat, dan menghambat pertumbuhan ekonomi serta pembangunan yang berkelanjutan.

Pentingnya mencegah dan menangani fraud di instansi pemerintah merupakan fokus utama, karena hal ini berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat, integritas lembaga pemerintah, dan penggunaan yang benar dari dana publik. Kasus penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi informasi yang menguntungkan pihak tertentu telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Dalam konteks ini, Kantor Kecamatan Ciwidey sebagai bagian dari struktur pemerintahan lokal tidak luput dari tantangan ini. Kekurangan dalam sistem

transparansi dan kurangnya akuntabilitas dalam proses pengelolaan anggaran serta sumber daya publik telah memicu ketidakpastian dan keraguan masyarakat terhadap kinerja instansi ini.

Namun, peran transparansi dan akuntabilitas dalam mencegah fraud bukanlah sekadar peningkatan akses informasi. Hal ini juga melibatkan keterbukaan dalam pengambilan keputusan, pertanggungjawaban atas tindakan, serta mekanisme hukuman dan insentif yang jelas bagi pelaku pelanggaran (World Bank, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam implementasi transparansi dan akuntabilitas di Kantor Kecamatan Ciwidey serta menyoroti potensi perbaikan dalam upaya pencegahan fraud. Penelitian juga bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep-konsep transparansi dan akuntabilitas dalam mengurangi risiko terjadinya fraud di lingkungan pemerintahan lokal, khususnya pada Studi Kasus Kantor Kecamatan Ciwidey.

Dalam konteks ini, urgensi penelitian terletak pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana praktik transparansi dan akuntabilitas dapat mengurangi potensi terjadinya fraud di institusi pemerintah lokal, serta memberikan solusi yang berkelanjutan terhadap masalah ini (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2018).

Hasil penelitian dapat menjadi Stimulasi Penelitian Lanjutan berupa sumber inspirasi bagi penelitian-penelitian mendatang di bidang terkait, mendorong eksplorasi lebih lanjut tentang faktor-faktor yang memengaruhi transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan (Patton, 2015). Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan terkait

upaya pencegahan fraud di institusi pemerintah (Transparency International, 2021).

### **KAJIAN PUSTAKA**

Transparansi dan akuntabilitas telah dianggap sebagai pilar utama dalam pencegahan fraud di lingkungan pemerintahan (A. Schick., 2016). Teori ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban yang jelas dalam pengelolaan sumber daya publik. Konsep ini menjadi landasan bagi kebijakan dan praktik terkait pencegahan fraud di institusi pemerintah.

Transparansi adalah prinsip atau kondisi dimana informasi, keputusan, dan tindakan dari suatu organisasi atau individu disajikan secara terbuka, jelas, dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Dalam konteks pemerintahan, transparansi menunjukkan tingkat keterbukaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam pengambilan keputusan, penggunaan sumber daya publik, dan menjalankan fungsi-fungsi lainnya (Hood, 2006). Secara khusus, transparansi dalam konteks pencegahan fraud di instansi pemerintah dapat berarti memberikan akses yang terbuka terhadap informasi keuangan, keputusan organisasi, proses pengadaan barang atau jasa, dan kebijakan-kebijakan yang diambil. Hal ini memungkinkan untuk pengawasan yang lebih baik oleh publik, media, lembaga pengawas, serta mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan sumber daya publik.

Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi, baik terkait dengan keuangan, kebijakan, maupun proses-proses yang terjadi di dalam suatu institusi pemerintah. Dalam konteks Kantor Kecamatan Ciwidey, transparansi dapat diwujudkan melalui penyediaan laporan keuangan yang

jelas dan mudah diakses oleh masyarakat, serta pengungkapan informasi terkait proses pengambilan keputusan.

Transparansi dianggap sebagai salah satu elemen kunci dari good governance atau tata kelola yang baik. Menurut teori ini, transparansi memainkan peran penting dalam memastikan integritas, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang memadai dalam keputusan pemerintahan (Hood, 2006). Informasi Asimetris mengacu pada situasi di mana satu pihak dalam transaksi memiliki lebih banyak informasi daripada pihak lainnya. Dalam konteks pemerintahan, asimetri informasi dapat mengarah pada kurangnya transparansi yang menyebabkan ketidakpastian atau peluang terjadinya tindakan fraud (Stiglitz, 2002). Transparansi merupakan faktor kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Teori ini menekankan bahwa keterbukaan dalam proses dan keputusan pemerintahan akan meningkatkan tingkat kepercayaan dan legitimasi institusi (Warren, 2014).

Sementara itu, akuntabilitas berkaitan erat dengan tanggung jawab dalam menjalankan tugas serta bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil. Dalam konteks pencegahan fraud, memastikan adanya akuntabilitas berarti menetapkan sistem pengawasan yang efektif, memisahkan tugas dan tanggung jawab secara jelas, dan melakukan audit secara berkala untuk memeriksa kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang berlaku.

Akuntabilitas adalah prinsip atau kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan pengelolaan yang dilakukan oleh individu atau organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau yang dipengaruhi oleh tindakan tersebut. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas mengacu

pada tanggung jawab lembaga pemerintah untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan memberikan justifikasi atas tindakan, kebijakan, serta penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat, lembaga pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya (Bovens, 2007). Akuntabilitas menekankan transparansi, integritas, dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan, membuat keputusan, dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambil, serta bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya publik dengan tepat.

Akuntabilitas Publik menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat yang mereka layani. Akuntabilitas publik memperkuat konsep bahwa lembaga pemerintah harus secara terbuka mempertanggungjawabkan tindakan dan pengelolaan sumber daya publik kepada warga negara (Bovens, 2007). Prinsip Akuntabilitas menguraikan prinsip-prinsip dan faktor-faktor yang merupakan elemen kunci dalam membangun sistem akuntabilitas yang efektif, termasuk klarifikasi tanggung jawab, pelaporan yang jelas, transparansi, serta mekanisme pengawasan dan sanksi yang efektif. Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memonitor dan mengawasi kinerja pemerintah. Akuntabilitas dapat diperkuat melalui keterlibatan aktif warga negara dalam pengambilan keputusan pemerintah serta mekanisme pemeriksaan dan tanggapan atas kinerja pemerintah.

Fraud atau penipuan adalah tindakan atau perilaku yang melibatkan manipulasi, tipu

muslihat, atau kecurangan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara ilegal atau merugikan pihak lain. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai konteks seperti keuangan, bisnis, pemerintahan, maupun individu. Tindakan fraud seringkali melibatkan penyembunyian informasi, pemalsuan dokumen, atau penyalahgunaan kepercayaan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara ilegal atau merugikan pihak lain (Albrecht dkk., 2011).

Pencegahan fraud atau penipuan dalam instansi pemerintah merupakan suatu hal yang krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Studi kasus di Kantor Kecamatan Ciwidey menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam mencegah kasus penipuan atau kecurangan yang mungkin terjadi.

Kantor Kecamatan Ciwidey sebagai bagian dari pemerintahan memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi-fungsi administratif serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, terkadang risiko penipuan atau fraud dapat muncul dalam bentuk penggelapan dana, manipulasi data, atau penggunaan sumber daya secara tidak sah. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam mencegah insiden-insiden semacam ini.

Langkah-langkah pencegahan fraud dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah dapat meliputi beberapa strategi, antara lain:

**Penerapan Kebijakan Transparansi:** Menerapkan kebijakan yang memastikan keterbukaan informasi terkait keputusan, proses pengelolaan keuangan, dan kebijakan organisasi. Ini termasuk penyediaan akses publik yang lebih luas terhadap informasi

terkait penggunaan dana publik dan kebijakan pemerintah (A. Schick., 2016).

**Pelaporan Rutin dan Publikasi Informasi:** Menyusun laporan keuangan, keputusan strategis, dan informasi penting lainnya secara rutin dan mempublikasikannya secara transparan agar dapat diakses oleh publik. Ini dapat mengurangi risiko manipulasi atau penyimpangan informasi.

**Auditor Independen dan Pemeriksaan Rutin:** Melakukan audit secara rutin oleh auditor independen untuk memeriksa penggunaan dana dan praktik manajemen keuangan. Ini membantu mendeteksi potensi fraud dan menekankan akuntabilitas terhadap tindakan yang diambil.

**Pelatihan dan Kesadaran Pegawai:** Melakukan pelatihan terkait etika, integritas, dan pemahaman tentang kebijakan anti-fraud bagi pegawai pemerintah. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran dan mencegah praktik-praktik fraud.

**Mekanisme Pengaduan (Whistleblowing):** Menyediakan mekanisme pengaduan yang aman bagi pegawai atau masyarakat yang mengetahui atau curiga adanya praktik fraud. Ini memungkinkan pengungkapan informasi tanpa takut akan represi.

**Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Menguatkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku fraud. Langkah ini menjadi penekan kuat bagi individu atau pihak yang berniat melakukan kecurangan.

**Komitmen Pemimpin Pemerintah:** Menegaskan komitmen dari para pemimpin pemerintah untuk menerapkan transparansi, akuntabilitas, dan zero tolerance terhadap praktik-praktik fraud di lingkungan kerja mereka (Warren, 2014).

Menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten dan terkoordinasi dapat membantu

mencegah fraud di instansi pemerintah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.

Good Governance (Tata Kelola yang Baik) merupakan konsep yang mendefinisikan praktik tata kelola yang baik dalam organisasi, termasuk instansi pemerintah. Konsep ini menekankan prinsip-prinsip penting seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan pengelolaan yang efektif dalam upaya menciptakan tata kelola yang baik (A. Schick., 2016).

Penerapan konsep Good Governance dalam konteks instansi pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut melakukan fungsi-fungsi administratif dan kebijakan dengan cara yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik yang dilayani. Beberapa aspek yang tercakup dalam konsep Good Governance antara lain:

**Transparansi dan Akuntabilitas:** Prinsip-prinsip ini merupakan fondasi penting dalam mencegah fraud di instansi pemerintah. Mereka mencakup aspek kejelasan, akses terhadap informasi, serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya publik (Hood, 2006).

**Transparansi:** Prinsip transparansi mengharuskan agar proses pengambilan keputusan, kebijakan, dan aktivitas pemerintah dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Ini melibatkan penerbitan informasi yang jelas, akses terhadap dokumen publik, serta keterbukaan dalam tata kelola kebijakan dan keuangan (Hood, 2006).

**Akuntabilitas:** Prinsip akuntabilitas menekankan bahwa lembaga pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan hukum. Ini melibatkan pembuatan laporan yang jelas, pengawasan terhadap tindakan pemerintah,

serta pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik (Hood, 2006).

**Partisipasi Publik:** Prinsip partisipasi publik mendorong adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Ini termasuk memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan dan mendengarkan pendapat serta masukan mereka.

**Pengelolaan yang Efektif:** Prinsip ini menuntut pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang efektif, termasuk pengelolaan keuangan yang baik, pengambilan keputusan yang rasional, dan implementasi kebijakan yang efisien.

Penerapan konsep Good Governance dalam instansi pemerintah menjadi penting untuk memastikan pengelolaan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab terhadap sumber daya dan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat.

Agency Theory (Teori Keagenan) adalah kerangka kerja yang mempelajari hubungan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan (stakeholders) dengan agen yang bertindak atas nama mereka. Teori ini menjelaskan hubungan keagenan di mana pemegang kepentingan (principal) menugaskan agen (agent) untuk melakukan tindakan tertentu dalam kepentingan mereka. Beberapa konsep kunci dalam Agency Theory meliputi:

**Konflik Kepentingan:** Terdapat perbedaan kepentingan antara principal dan agent karena kedua pihak memiliki tujuan yang mungkin tidak selalu sejalan. Konflik kepentingan ini dapat menghasilkan perilaku yang tidak sesuai atau tidak menguntungkan bagi principal.

**Moral Hazard (Resiko Moral):** Konsep ini mengacu pada situasi di mana agent memiliki insentif untuk bertindak dengan cara yang tidak

diinginkan oleh principal karena adanya asimetri informasi dan kurangnya pemantauan. **Asimetri Informasi:** Terjadi ketika agent memiliki informasi lebih banyak daripada principal. Asimetri ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi principal tentang tindakan yang diambil oleh agent.

**Monitoring dan Insentif:** Salah satu cara untuk mengatasi masalah agensi adalah melalui upaya pemantauan dan memberikan insentif yang sesuai kepada agen untuk memastikan bahwa perilaku mereka sejalan dengan kepentingan principal.

Teori Keagenan sering diaplikasikan dalam konteks perusahaan di mana pemilik (principal) menugaskan manajer (agent) untuk mengelola perusahaan. Namun, konsep ini juga relevan dalam konteks instansi pemerintah di mana pejabat publik bertindak sebagai agen untuk mewakili kepentingan masyarakat atau pemegang kepentingan (Jensen & Meckling, 1976).

Etika dan Integritas membahas nilai-nilai moral, prinsip, dan perilaku yang dianggap baik atau benar dalam konteks perilaku individu dan organisasi. Dalam konteks pemerintahan dan manajemen, teori ini sangat relevan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh individu atau institusi mempertimbangkan aspek moral dan integritas. Beberapa konsep kunci dalam Teori Etika dan Integritas meliputi:

**Kode Etik:** Merujuk pada seperangkat aturan, prinsip, atau nilai yang memandu perilaku dan tindakan individu atau kelompok. Kode etik sering digunakan sebagai panduan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan moralitas dan integritas.

**Kepemimpinan Beretika:** Fokus pada peran pemimpin dalam mempromosikan nilai-nilai etika dan integritas dalam organisasi. Pemimpin yang beretika berperan penting

dalam membentuk budaya organisasi yang menghargai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.

**Pertimbangan Moral dalam Pengambilan Keputusan:** Teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek etis dan moral dalam setiap keputusan yang diambil. Ini mencakup mempertimbangkan dampak keputusan terhadap berbagai pemangku kepentingan (stakeholders).

**Pencegahan Konflik Kepentingan:** Mengenali, mengelola, dan mencegah konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi integritas dan kredibilitas institusi atau individu.

**Teori Etika dan Integritas** memiliki peran penting dalam konteks instansi pemerintah karena membentuk dasar untuk perilaku yang bertanggung jawab dan adil dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya publik, dan pelayanan kepada masyarakat (Treviño & Nelson, 2016).

**Keamanan Sistem Informasi** menyoroti pentingnya keamanan sistem informasi pemerintah untuk mencegah potensi celah bagi tindakan kecurangan (Laudon & Laudon, 2016). Menyediakan kerangka kerja untuk melindungi sistem informasi pemerintah dari ancaman, termasuk upaya-upaya pencegahan terhadap fraud yang dapat terjadi melalui celah keamanan sistem. **Keamanan Sistem Informasi (Information Security)** adalah praktik, teknologi, kebijakan, dan prosedur yang dirancang untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta sistem informasi dari akses yang tidak sah, penggunaan yang tidak diizinkan, perubahan yang tidak sah, atau kebocoran informasi. Dalam konteks pencegahan fraud di instansi pemerintah, keamanan sistem informasi memiliki peran penting dalam melindungi data sensitif, keuangan, dan operasional dari ancaman cyber dan manipulasi informasi.

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperkuat keamanan sistem informasi di instansi pemerintah meliputi:

**Penggunaan Enkripsi dan Pengamanan Data:** Mengenkripsi data sensitif, baik saat disimpan maupun saat dipindahkan, untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah.

**Pengelolaan Akses dan Pengendalian Identitas:** Menerapkan sistem pengelolaan akses yang ketat, termasuk penggunaan kata sandi yang kuat, pengendalian akses berbasis peran, serta otentikasi dua faktor.

**Pemantauan dan Deteksi Ancaman:** Menggunakan perangkat lunak pemantauan yang canggih untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau ancaman keamanan potensial.

**Pemulihan dan Penyediaan Cadangan:** Memiliki rencana pemulihan bencana yang solid dan melakukan pencadangan data secara teratur untuk mengurangi dampak dari serangan atau kehilangan data.

**Pendidikan dan Kesadaran Keamanan:** Melakukan pelatihan secara berkala kepada staf untuk meningkatkan kesadaran terkait risiko keamanan informasi dan praktik-praktik yang aman dalam penggunaan teknologi informasi.

**Kepatuhan terhadap Standar Keamanan:** Mematuhi standar dan regulasi keamanan yang berlaku dalam pengelolaan informasi sensitif dan sistem informasi pemerintah.

Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi sistem informasi pemerintah dari serangan siber dan manipulasi yang dapat menjadi faktor penyebab terjadinya fraud.

Bank Dunia (World Bank, 2020) dalam laporannya menggarisbawahi urgensi transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik sebagai strategi efektif untuk menekan praktik penipuan. Selain itu, OECD (Organisation for Economic Co-operation and

Development (OECD), 2018) menyajikan berbagai pandangan tentang konsep akuntabilitas yang tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban tetapi juga termasuk langkah-langkah preventif dalam pencegahan fraud.

Hasil penelitian terdahulu, seperti yang diungkapkan dalam jurnal-jurnal nasional dan internasional, menunjukkan bahwa penerapan praktik transparansi dan akuntabilitas dapat secara signifikan mengurangi insiden fraud di institusi pemerintahan (Transparency International, 2021). Studi-studi ini memberikan wawasan penting tentang efektivitas berbagai kebijakan dan mekanisme yang dapat diterapkan untuk meminimalkan risiko fraud di lingkungan pemerintahan.

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada salahsatu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Fransiska Rahayu<sup>1</sup>, Luh Dina Ekasari<sup>2</sup>, Ahmad mukoffi<sup>3</sup> (2021) yang berjudul " Upaya Pencegahan Kecurangan Dalam Mengelola Dana Desa Sesuai Dengan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi ". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan tingkat kemampuan untuk menganalisis upaya. Dalam menghentikan penipuan terhadap sistem pengelolaan keuangan desa, serta mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat penipuan tersebut. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menentukan sejauh mana fenomena yang terjadi terkait dengan sistem pengelolaan keuangan desa. Desa Sumbersekar berada di Jalan Raya Sumbersekar No.108, Krajan, Sumbersekar, Kecamatan Dau Malang, Jawa Timur 65151, dan akan menjadi subjek penelitian ini. (Rahayu dkk., 2021).

Penelitiannya menghasilkan bahwa Kantor desa Sumbersekar Kecamatan Dau, Jawa Timur, menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi untuk menghindari kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut: Pemerintah desa Sumbersekar telah menerapkan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan anggaran desa mereka dengan memberikan informasi tentang penggunaan dana desa untuk mencegah kecurangan dalam penggunaan dana. Membuat pemerintah desa bertanggung jawab atas penggunaan dana, mereka bekerja sama dengan masyarakat, dan masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan keuangan desa melalui akses informasi. Desa Sumbersekar telah menerapkan prinsip akuntabilitas untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana. Namun, karena informasi hanya diberikan melalui papan informasi dan benner, orang tidak dapat mengaksesnya melalui internet atau blog khusus desa sumbersekar, desa sumbersekar belum benar-benar mempermudah masyarakat untuk mengetahuinya. Dan dengan melakukan Upaya untuk menghindari penipuan dalam pengelolaan dana desa dengan menggunakan tiga mekanisme pencegahan penipuan berdasarkan prinsip transparansi.

Pencegahan fraud di Kantor Kecamatan Ciwidey atau instansi pemerintah lainnya bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan kerjasama antara berbagai pihak, implementasi kebijakan yang ketat, serta keterbukaan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk membangun kepercayaan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan yang kokoh dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Terkait dengan hal ini, perlu adanya langkah konkret dan terukur yang diambil oleh pihak terkait di Kantor Kecamatan Ciwidey untuk

memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan hanya sekadar konsep, tetapi menjadi praktek nyata dalam setiap aspek operasionalnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Kantor Kecamatan Ciwidey. Kualitatif dipilih untuk memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang implementasi transparansi dan akuntabilitas serta faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pencegahan fraud di lingkungan pemerintahan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petinggi dan staf Kantor Kecamatan Ciwidey. Sementara data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, kebijakan, dan arsip yang terkait dengan praktik transparansi dan akuntabilitas di Kantor Kecamatan tersebut. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan menggunakan pedoman terstruktur untuk menggali pandangan, pemahaman, dan pengalaman individu terkait penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam mencegah fraud di instansi pemerintah. Penarikan sampel dilakukan secara bertujuan (*purposive sampling*) untuk memilih responden yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dalam konteks praktik pencegahan fraud di Kantor Kecamatan Ciwidey. Penelitian ini tidak mengajukan hipotesis spesifik karena lebih fokus pada eksplorasi dan pemahaman mendalam tentang penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pencegahan fraud di Kantor Kecamatan Ciwidey. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola, tema, dan aspek-aspek kunci terkait dengan penerapan transparansi dan akuntabilitas serta

upaya pencegahan fraud di lingkungan pemerintahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil :

Tingkat Transparansi:

Temuan menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi. Meskipun informasi tersedia, responden merasa kesulitan mengaksesnya karena kurangnya penyebaran informasi yang efektif.

Tingkat transparansi merujuk pada sejauh mana sebuah organisasi atau entitas memberikan akses terhadap informasi kepada pemangku kepentingan terkait keputusan, kebijakan, dan operasionalnya. Dalam konteks pengelolaan keuangan di sebuah kantor pemerintahan seperti Kantor Kecamatan Ciwidey, tingkat transparansi dapat diukur dari sejumlah aspek:

**Keterbukaan Informasi Keuangan:** Seberapa jelas dan terbukanya informasi terkait dengan anggaran, pengeluaran, serta laporan keuangan kantor tersebut kepada publik.

**Proses Pengambilan Keputusan yang Terbuka:** Se jauh mana kebijakan keuangan dibuat dengan proses yang transparan dan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, serta sejauh mana keputusan tersebut dijelaskan kepada publik.

**Keterlibatan Masyarakat:** Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan keuangan, apakah terdapat forum publik atau konsultasi terbuka terkait rencana anggaran atau kebijakan keuangan.

**Akses Informasi:** Ketersediaan informasi dan dokumentasi keuangan yang mudah diakses oleh publik atau pihak-pihak yang berkepentingan.

**Pengungkapan Risiko dan Kinerja Keuangan:** Se jauh mana risiko keuangan yang mungkin

dihadapi serta kinerja keuangan kantor tersebut dijelaskan secara transparan kepada publik.

Tingkat transparansi yang tinggi dalam pengelolaan keuangan menandakan komitmen institusi terhadap akuntabilitas, integritas, dan partisipasi publik. Ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap penggunaan dana publik.

#### Praktik Akuntabilitas:

Melalui wawancara mendalam, terlihat bahwa pemahaman akan akuntabilitas bervariasi di antara staf. Beberapa di antaranya merasa kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanggung jawab mereka.

Praktik akuntabilitas dalam konteks pengelolaan keuangan di sebuah kantor pemerintahan seperti Kantor Kecamatan Ciwidey mencakup sejumlah aspek yang berfokus pada tanggung jawab, transparansi, dan pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Beberapa poin penting dalam praktik akuntabilitas meliputi:

**Pemahaman akan Tanggung Jawab Finansial:** Praktik akuntabilitas memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan keuangan kantor memiliki pemahaman yang jelas akan tanggung jawab mereka dalam penggunaan dan pelaporan dana publik.

**Kepatuhan Terhadap Prosedur dan Aturan:** Ini mencakup kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Hal ini termasuk pula penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu.

**Pelaporan dan Transparansi:** Praktik akuntabilitas juga mencakup ketersediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang pengeluaran keuangan dan kinerja keuangan secara umum.

**Pengawasan Internal yang Efektif:** Proses pengawasan yang kuat dalam organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, serta mendeteksi dan mencegah adanya penyelewengan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan.

**Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan:** Praktik akuntabilitas juga melibatkan evaluasi berkelanjutan terhadap proses keuangan, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dana publik. Praktik akuntabilitas yang kuat di Kantor Kecamatan Ciwidey menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana publik dikelola dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hal ini juga memberikan dasar bagi pengawasan yang efektif serta penyusunan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan pemerintahan.

#### Sistem Pencegahan Fraud:

Analisis data menyoroti bahwa meskipun ada prosedur pencegahan, implementasinya tidak konsisten. Temuan juga menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran akan potensi kecurangan dapat menjadi celah untuk terjadinya fraud.

Sistem pencegahan fraud dalam konteks pengelolaan keuangan di sebuah kantor pemerintahan seperti Kantor Kecamatan Ciwidey merupakan rangkaian strategi dan kontrol yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggulangi potensi kecurangan atau penipuan dalam pengelolaan dana publik. Beberapa aspek kunci dari sistem pencegahan fraud meliputi:

**Kebijakan dan Prosedur yang Jelas:** Adanya kebijakan yang terperinci dan prosedur yang jelas dalam pengelolaan keuangan yang mencakup penggunaan dana, pembayaran, dan pelaporan keuangan. Ini membantu

memastikan bahwa setiap langkah terkait keuangan terdokumentasi dan diperiksa.

**Pengawasan dan Monitoring yang Ketat:** Implementasi pengawasan internal yang efektif untuk memonitor aktivitas keuangan, termasuk audit rutin dan evaluasi berkala terhadap transaksi keuangan untuk mendeteksi pola atau tanda-tanda kecurangan.

**Pelatihan dan Kesadaran:** Memberikan pelatihan kepada staf terkait risiko kecurangan, tanda-tanda kecurangan, serta prosedur yang harus diikuti untuk melaporkan atau menghindari kecurangan.

**Pelaporan dan Penanganan Kasus Kecurangan:** Membangun mekanisme untuk melaporkan kecurangan serta prosedur penanganan dan tindakan yang harus diambil jika terjadi kecurangan atau penipuan.

**Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan:** Melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas sistem pencegahan fraud, dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk menghadapi perubahan lingkungan risiko atau kelemahan dalam sistem yang ada.

Pentingnya sistem pencegahan fraud yang kuat adalah untuk melindungi dana publik dan memastikan bahwa kepercayaan masyarakat tetap terjaga terhadap lembaga pemerintahan. Dengan memiliki sistem yang solid, kantor pemerintahan dapat mengurangi risiko kecurangan dan memastikan penggunaan dana publik yang bertanggung jawab dan efisien.

**Temuan 1: Tingkat Transparansi dalam Proses Pengelolaan Keuangan**

Menunjukkan sejauh mana informasi keuangan pemerintah diberikan kepada publik. Tingkat transparansi dalam proses pengelolaan keuangan merupakan aspek penting dalam menilai integritas dan akuntabilitas sebuah entitas atau institusi, termasuk dalam konteks kantor pemerintahan seperti Kantor Kecamatan Ciwidey. Transparansi keuangan berkaitan

dengan seberapa terbuka informasi yang disediakan kepada pemangku kepentingan terkait dengan penggunaan dana publik, anggaran, serta keputusan keuangan yang diambil. Melalui analisis kualitatif, ditemukan bahwa tingkat transparansi dalam proses pengelolaan keuangan di Instansi Pemerintah memiliki peran penting dalam pencegahan fraud.

Di dalam Kantor Kecamatan, transparansi dalam proses pengelolaan keuangan bisa mencakup beberapa aspek:

**Pengungkapan Informasi Anggaran:** Seberapa terbuka kantor tersebut dalam memberikan informasi terkait alokasi dana, rencana anggaran, dan laporan keuangan kepada masyarakat atau pihak yang berkepentingan.

**Keterbukaan dalam Penggunaan Dana:** Sejauh mana penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan. Ini mencakup penyampaian informasi mengenai pengeluaran, investasi, atau belanja yang telah dilakukan.

**Keterlibatan Masyarakat:** Sejauh mana kantor tersebut melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan keuangan, misalnya melalui dialog publik atau pertemuan terbuka untuk membahas anggaran atau proyek tertentu.

**Akses Terhadap Informasi:** Seberapa mudahnya bagi masyarakat atau pihak-pihak terkait untuk mengakses informasi keuangan yang diperlukan, seperti laporan keuangan, informasi anggaran, atau dokumentasi kebijakan keuangan.

Transparansi yang tinggi dalam pengelolaan keuangan tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan, tetapi juga memungkinkan adanya pemantauan yang lebih baik terhadap penggunaan dana publik, serta meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hal ini juga mendukung

pencapaian tujuan pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Tingkat transparansi yang rendah dalam proses pengelolaan keuangan pemerintah dapat menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya praktik-praktik fraud. Oleh karena itu, meningkatkan transparansi dalam penyajian informasi keuangan dan alokasi dana publik menjadi kunci dalam mencegah kemungkinan terjadinya fraud di instansi pemerintah.

#### Temuan 2: Tingkat Keterbukaan dalam Pengambilan Keputusan

Menganalisis seberapa terbuka dan terjangkau proses pengambilan keputusan di instansi pemerintah. Tingkat keterbukaan dalam pengambilan keputusan merujuk pada sejauh mana proses pengambilan keputusan di Kantor Kecamatan Ciwidey atau dalam institusi pemerintahan lainnya dapat diakses dan dipahami oleh publik atau pemangku kepentingan terkait.

Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat keterbukaan dalam pengambilan keputusan antara lain:

**Transparansi Informasi:** Seberapa jelas dan terbukanya informasi mengenai proses pengambilan keputusan, termasuk keputusan keuangan, kebijakan, atau program-program yang akan dilaksanakan.

**Partisipasi Publik:** Sejauh mana masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini bisa melalui forum publik, konsultasi, atau mekanisme lain yang memungkinkan masukan dari berbagai pihak.

**Akses terhadap Informasi:** Ketersediaan akses yang mudah terhadap dokumen-dokumen atau informasi terkait keputusan yang dibuat oleh kantor pemerintahan. Informasi-informasi tersebut harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

**Jelasnya Tanggung Jawab:** Pemahaman yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan bagaimana prosesnya dilakukan dapat membantu dalam meningkatkan keterbukaan.

Tingkat keterbukaan yang tinggi dalam pengambilan keputusan penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, mengurangi potensi ketidakpuasan, dan memperkuat keterlibatan publik dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan memiliki proses pengambilan keputusan yang terbuka dan terbuka, institusi pemerintahan dapat memastikan adanya pertanggungjawaban dan legitimasi yang lebih besar dalam keputusan yang dibuat.

#### Temuan 3: Persepsi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pemerintah

Menggambarkan pandangan masyarakat terkait tingkat akuntabilitas dan kepercayaan terhadap pemerintah setempat.

Persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah adalah pandangan atau penilaian mereka terhadap sejauh mana pemerintah bertanggung jawab, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan yang diambilnya. Persepsi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman pribadi, informasi yang diterima, serta harapan terhadap pemerintah. Berikut beberapa hal yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah:

**Transparansi Informasi:** Sejauh mana informasi-informasi terkait kebijakan, anggaran, dan keputusan pemerintah tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

**Partisipasi Publik:** Tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan pemerintah dapat memengaruhi

persepsi mereka terhadap tingkat akuntabilitas pemerintah.

**Kinerja Pemerintah:** Bagaimana pemerintah mengelola berbagai masalah publik, menangani isu-isu penting, dan menjalankan program-program yang bermanfaat juga dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap tingkat akuntabilitas pemerintah.

**Kebijakan Anti-Korupsi dan Transparansi:** Upaya yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan anti-korupsi, memperkuat transparansi, dan meningkatkan akuntabilitas dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kinerja dan integritas pemerintah.

**Media dan Opini Publik:** Bagaimana media melaporkan tentang tindakan pemerintah serta opini atau pernyataan masyarakat yang terpapar melalui media sosial dan lainnya juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah.

**Budaya dan Nilai Masyarakat:** Nilai-nilai, budaya, dan ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah juga berperan dalam membentuk persepsi mereka terhadap akuntabilitas pemerintah.

Persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah memainkan peran penting dalam mempengaruhi dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi, mengedepankan kebijakan yang berintegritas, serta membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dapat membantu memperkuat persepsi positif terhadap akuntabilitas mereka.

Pembahasan :

**Kendala-Kendala dalam Transparansi:**

Pembahasan menekankan perlunya perbaikan dalam komunikasi internal untuk memastikan informasi dapat diakses dengan lebih mudah oleh semua pihak terkait.

Beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam mencapai tingkat transparansi yang optimal dalam pengelolaan keuangan di Kantor Kecamatan Ciwidey atau institusi pemerintah lainnya meliputi:

**Keterbatasan Akses Informasi:** Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses terhadap informasi terkait keuangan publik. Dokumen-dokumen terkait anggaran, pengeluaran, atau laporan keuangan mungkin tidak tersedia secara terbuka atau sulit diakses oleh masyarakat umum.

**Kurangnya Keterbukaan dalam Pengambilan Keputusan:** Keterbatasan dalam pengungkapan proses pengambilan keputusan keuangan juga menjadi kendala. Informasi terkait keputusan strategis atau keuangan yang diambil oleh kantor pemerintahan sering kali tidak dijelaskan secara transparan kepada publik.

**Kesulitan dalam Penyampaian Informasi yang Kompleks:** Pengelolaan keuangan dapat melibatkan terminologi teknis atau kompleks yang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam menyampaikan informasi keuangan dengan cara yang dapat dipahami oleh semua pihak.

**Kultur Tertutup:** Terkadang, kekurangan transparansi terkait keuangan dapat dipengaruhi oleh kultur organisasi yang tertutup di kantor pemerintahan. Kultur ini mungkin tidak mendorong keterbukaan dan berbagi informasi secara terbuka kepada publik.

**Keterbatasan Sumber Daya:** Keterbatasan dalam sumber daya manusia, teknologi, atau infrastruktur juga dapat menjadi kendala dalam menyediakan informasi keuangan dengan cepat atau dalam format yang mudah diakses.

Mengatasi kendala-kendala tersebut memerlukan komitmen dari pihak terkait untuk memperbaiki proses pengelolaan keuangan, membangun kebijakan yang lebih inklusif,

meningkatkan keterbukaan dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung untuk menyediakan informasi keuangan yang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.

**Tantangan dalam Praktik Akuntabilitas:**

Diskusi memfokuskan pada pentingnya menyelaraskan pemahaman tentang akuntabilitas di seluruh departemen. Disarankan adanya pelatihan dan pendekatan yang lebih inklusif dalam proses pengambilan keputusan.

Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam praktik akuntabilitas di lingkungan pengelolaan keuangan Kantor Kecamatan Ciwidey atau institusi pemerintah serupa meliputi:

**Ketidajelasan Tanggung Jawab:** Tantangan utama adalah ketidakjelasan mengenai tanggung jawab individu atau unit terkait dalam pengelolaan keuangan. Kurangnya pemahaman yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab atas keputusan keuangan dapat menjadi hambatan dalam praktik akuntabilitas.

**Kurangnya Pemahaman akan Kebijakan dan Prosedur:** Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran akan kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran aturan dan keputusan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

**Keterbatasan dalam Pelaporan Keuangan:** Tantangan lain mungkin berasal dari keterbatasan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya kapasitas atau pemahaman dalam menghasilkan laporan keuangan yang sesuai standar.

**Resistensi terhadap Perubahan:** Terkadang, tantangan dalam memperbaiki praktik

akuntabilitas adalah resistensi terhadap perubahan. Karyawan atau manajemen yang enggan untuk mengadopsi atau mengubah proses kerja lama yang tidak efisien menjadi lebih akuntabel.

**Keterbatasan Sumber Daya:** Keterbatasan sumber daya seperti personel yang terlatih, teknologi yang memadai, atau sistem yang memungkinkan dapat menjadi tantangan dalam menerapkan praktik akuntabilitas yang optimal.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan komitmen dari seluruh pihak terkait, termasuk manajemen dan staf, untuk meningkatkan pemahaman akan kebijakan dan prosedur, melaksanakan pelaporan keuangan dengan akurat dan tepat waktu, serta memperkuat budaya organisasi yang mendukung praktik akuntabilitas yang kuat.

**Perbaikan Sistem Pencegahan Fraud:**

Pembahasan menyoroti kebutuhan akan revisi dalam sistem pencegahan yang lebih proaktif dan terintegrasi, serta promosi kesadaran akan potensi risiko kecurangan.

Perbaikan sistem pencegahan fraud dalam konteks pengelolaan keuangan di Kantor Kecamatan Ciwidey atau institusi pemerintah serupa melibatkan sejumlah langkah untuk memperkuat kontrol, pengawasan, dan keamanan dalam mengelola dana publik. Beberapa perbaikan yang dapat dilakukan dalam sistem pencegahan fraud meliputi:

**Perbaikan Kebijakan dan Prosedur:** Memperkuat kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan keuangan dengan menambahkan langkah-langkah kontrol yang lebih ketat, memperjelas tata kelola keuangan, serta menetapkan batasan yang lebih jelas terhadap penggunaan dana.

**Pengawasan Internal yang Lebih Efektif:** Meningkatkan pengawasan internal dengan lebih seringnya pemeriksaan, audit yang

komprehensif, serta pembentukan tim atau departemen khusus yang bertanggung jawab atas pengawasan fraud.

**Pendidikan dan Pelatihan:** Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang tanda-tanda kecurangan, prosedur pelaporan, serta kebijakan yang berlaku. Edukasi ini dapat meningkatkan kesadaran akan risiko kecurangan dan mendorong pelaporan yang lebih baik.

**Implementasi Teknologi Keamanan:** Menggunakan teknologi keamanan yang lebih canggih untuk mengamankan sistem keuangan, termasuk penggunaan sistem keamanan yang terenkripsi, kontrol akses yang lebih ketat, dan penggunaan alat analisis data untuk mendeteksi pola kecurangan.

**Penguatan Budaya Organisasi:** Membangun budaya organisasi yang menekankan pentingnya integritas, etika, dan kepatuhan. Ini mencakup menciptakan lingkungan di mana pelaporan kecurangan didorong dan dihargai.

**Evaluasi Rutin dan Peningkatan Berkelanjutan:** Melakukan evaluasi berkala terhadap sistem pencegahan fraud yang telah diterapkan dan melakukan perbaikan atau penyesuaian jika ditemukan kelemahan atau kekurangan.

Perbaikan sistem pencegahan fraud memerlukan komitmen yang kuat dari manajemen dan karyawan untuk menerapkan langkah-langkah yang telah disepakati. Dengan memiliki sistem yang lebih kuat, kantor pemerintahan dapat mengurangi risiko kecurangan dan memastikan penggunaan dana publik yang bertanggung jawab.

**Keterkaitan Transparansi dengan Pencegahan Fraud**

Menyimpulkan bagaimana tingkat transparansi dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya praktik fraud di instansi pemerintah.

Keterkaitan antara transparansi dengan pencegahan fraud sangatlah erat. Transparansi dapat menjadi kunci dalam mencegah terjadinya tindakan fraud atau kecurangan di lingkungan organisasi, termasuk di Kantor Kecamatan Ciwidey. Berikut adalah beberapa cara di mana transparansi berperan dalam pencegahan fraud:

**Mendorong Pertanggungjawaban:** Transparansi dapat menciptakan suasana di mana setiap tindakan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan memastikan informasi keuangan, proses, dan kebijakan terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak, peluang untuk melakukan kecurangan dapat diminimalisir karena adanya pemantauan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

**Mengurangi Kesempatan untuk Kecurangan:** Dengan menyediakan akses terbuka terhadap informasi keuangan, prosedur, dan pengawasan, transparansi mengurangi celah atau kesempatan bagi pelaku fraud untuk melakukan tindakan yang tidak sah. Hal ini karena transparansi cenderung menciptakan sistem yang lebih terstruktur dan terawasi.

**Mendorong Kepatuhan dan Etika yang Tinggi:** Dengan adanya transparansi, norma etika yang tinggi dan kepatuhan terhadap prosedur menjadi lebih dijunjung tinggi. Masyarakat atau pegawai di lingkungan tersebut cenderung lebih mematuhi aturan karena segala tindakan akan terlihat oleh semua pihak.

**Meningkatkan Deteksi Dini:** Transparansi yang tinggi dapat membantu dalam mendeteksi tanda-tanda awal kecurangan lebih cepat. Ketika informasi keuangan atau kebijakan terbuka, maka lebih mudah bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan untuk menemukan atau mengidentifikasi potensi kecurangan.

**Membangun Kepedulian Bersama:** Dengan adanya transparansi, kesadaran dan kepedulian

bersama terhadap integritas dan kepatuhan terhadap aturan meningkat. Ini dapat menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa bertanggung jawab untuk mengawasi dan melaporkan ketidakpatuhan atau kecurangan.

Dengan demikian, transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional tidak hanya membantu membangun kepercayaan publik, tetapi juga menjadi instrumen yang kuat dalam pencegahan fraud. Dengan menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan terawasi, organisasi dapat mengurangi risiko dan celah untuk terjadinya kecurangan.

**Peran Akuntabilitas dalam Mengurangi Risiko Fraud**

Mendiskusikan hubungan antara akuntabilitas pemerintah dan penurunan insiden fraud. Peran akuntabilitas sangat penting dalam mengurangi risiko fraud atau kecurangan dalam suatu organisasi. Akuntabilitas mencakup tanggung jawab, transparansi, dan kewajiban individu atau entitas untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya. Berikut adalah beberapa peran utama akuntabilitas dalam mengurangi risiko fraud: **Menetapkan Standar dan Kebijakan yang Jelas:** Akuntabilitas membantu dalam penetapan standar dan kebijakan yang jelas terkait dengan pengelolaan keuangan, proses operasional, dan kewajiban etis. Dengan memiliki standar yang jelas, anggota organisasi memiliki pedoman yang membatasi kesempatan terjadinya kecurangan.

**Mendorong Pengawasan yang Lebih Ketat:** Konsep akuntabilitas mendorong pengawasan yang lebih ketat atas tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu atau unit kerja. Hal ini dapat mengurangi risiko terjadinya kecurangan karena adanya pemantauan yang cermat.

**Pengembangan Budaya Kepatuhan dan Integritas:** Akuntabilitas membantu dalam membangun budaya organisasi yang mementingkan kepatuhan terhadap aturan, etika yang tinggi, serta integritas dalam melakukan tugas-tugasnya. Budaya ini dapat menjadi penghambat terjadinya tindakan kecurangan.

**Transparansi dalam Pelaporan dan Pengungkapan Informasi:** Akuntabilitas mendorong transparansi dalam pelaporan keuangan dan operasional. Dengan memberikan akses terbuka terhadap informasi, ini membuat lebih mudah untuk mendeteksi kecurangan atau ketidaksesuaian dengan kebijakan.

**Peningkatan Kepatuhan dan Pelaporan Kecurangan:** Dengan adanya akuntabilitas, anggota organisasi cenderung lebih patuh dan lebih siap untuk melaporkan ketidakpatuhan atau indikasi kecurangan karena mereka merasa bertanggung jawab untuk menjaga integritas organisasi.

**Mendorong Tanggung Jawab Individu:** Akuntabilitas memperkuat rasa tanggung jawab individu atas tindakan dan keputusannya. Hal ini dapat mencegah orang-orang yang ingin melakukan kecurangan karena mereka sadar bahwa tindakan mereka akan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, akuntabilitas memainkan peran krusial dalam mencegah terjadinya kecurangan. Dengan menciptakan lingkungan di mana tanggung jawab, transparansi, dan ketaatan terhadap aturan dijunjung tinggi, risiko terjadinya fraud dapat ditekan dan dikelola dengan lebih baik.

**Implikasi Hasil Penelitian terhadap Pengelolaan Pemerintah**

Menyajikan rekomendasi yang bersifat praktis untuk meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas dalam upaya pencegahan fraud di instansi pemerintah.

Tergantung pada hasil penelitian yang spesifik, implikasi terhadap pengelolaan pemerintah bisa sangat bervariasi. Namun, beberapa implikasi umum dari hasil penelitian terhadap pengelolaan pemerintah bisa mencakup:

**Perbaikan Kebijakan Publik:** Hasil penelitian yang mengidentifikasi masalah-masalah tertentu dalam pengelolaan keuangan pemerintah dapat memberikan dasar untuk mengembangkan atau memperbaiki kebijakan publik yang lebih efektif dan efisien.

**Rekomendasi Perbaikan Proses:** Penelitian yang menyoroti kelemahan dalam proses pengelolaan keuangan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk memperbaiki prosedur dan sistem yang sudah ada di dalam pemerintahan.

**Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:** Hasil penelitian yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan bisa mendorong pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam menyediakan informasi keuangan dan operasional kepada publik.

**Pengembangan Program Pelatihan:** Penelitian yang mengidentifikasi kebutuhan akan peningkatan kapasitas atau pengetahuan dalam pengelolaan keuangan bisa menjadi landasan untuk pengembangan program pelatihan yang sesuai bagi pegawai pemerintah.

**Mengukur dan Meningkatkan Kinerja:** Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan untuk mendorong upaya perbaikan terus-menerus.

**Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik:** Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik di tingkat kebijakan, mengarah pada

penggunaan dana publik yang lebih efektif dan hasil yang lebih baik bagi masyarakat.

Pentingnya implikasi dari hasil penelitian adalah memberikan arah atau panduan yang jelas bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan layanan mereka kepada masyarakat. Ini bisa melalui perbaikan kebijakan, prosedur, atau praktik operasional yang ada, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

**Analisis Transparansi dan Akuntabilitas di Kantor Kecamatan Ciwidey :** Hasil penelitian ini menunjukkan adanya tingkat transparansi yang relatif tinggi dalam beberapa proses administratif di Kantor Kecamatan Ciwidey. Dalam survei yang melibatkan staf dan petinggi, sekitar 80% responden menyatakan adanya kebijakan yang mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran dan penggunaan sumber daya. Meskipun demikian, terdapat kekurangan dalam penyediaan informasi kepada publik terkait kebijakan dan keputusan penting yang diambil.

Di sisi lain, tingkat akuntabilitas di Kantor Kecamatan Ciwidey menunjukkan pola yang lebih kompleks. Meskipun sebagian besar responden (65%) menyatakan bahwa terdapat pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil, hanya sebagian kecil dari mereka yang merasa adanya sistem yang memberikan insentif atau hukuman yang jelas terkait kinerja mereka.

**Relevansi dengan Teori dan Penelitian Terdahulu :** Hasil ini mendukung teori yang menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas saling terkait dalam konteks pencegahan fraud di sektor pemerintahan (A. Schick., 2016). Sementara teori-teori sebelumnya menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban dalam mencegah praktik

penipuan, hasil ini menunjukkan bahwa implementasi praktik tersebut di Kantor Kecamatan Ciwidey masih memiliki celah yang perlu diperbaiki.

**Kebaruan Temuan dan Implikasi :** Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan, terdapat ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Implikasinya adalah perlunya peningkatan sistem informasi publik yang lebih terbuka dan jelas serta perbaikan dalam sistem insentif dan hukuman terkait kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas staf dan petinggi di Kantor Kecamatan Ciwidey.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam mengkaji peran transparansi dan akuntabilitas dalam pencegahan fraud di instansi pemerintah, beberapa temuan penting muncul:

**Transparansi adalah Kunci Pencegahan Fraud:** Transparansi dalam pengelolaan dana publik adalah elemen kunci dalam mencegah terjadinya penipuan di instansi pemerintah. Pengungkapan informasi keuangan secara terbuka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana publik, mengidentifikasi penyimpangan, dan menciptakan deterrensi bagi para pelaku fraud.

**Akuntabilitas Memperkuat Pengawasan:** Akuntabilitas yang melibatkan pengawasan internal yang kuat, audit independen, sanksi hukum, dan tanggung jawab pemerintah adalah fondasi penting dalam memastikan penggunaan dana publik yang jujur. Akuntabilitas memperkuat pengawasan dan menciptakan kewajiban dalam pengelolaan dana publik.

**Peran Masyarakat dalam Pencegahan Fraud:** Masyarakat memiliki peran krusial dalam

pengawasan dana publik. Mereka harus diberdayakan melalui akses terhadap informasi dan kebijakan yang mendukung partisipasi aktif dalam pengawasan dana publik. Partisipasi masyarakat dapat membantu mendeteksi potensi tindakan penipuan.

**Saran:**

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran praktis dapat diberikan kepada instansi pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan fraud:

**Meningkatkan Keterbukaan Informasi:** Instansi pemerintah harus secara aktif mempublikasikan informasi keuangan, anggaran, dan laporan pelaksanaan program secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui platform daring dan publikasi berkala.

**Memperkuat Pengawasan Internal:** Instansi pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pengawasan internal mereka untuk memantau penggunaan dana publik dan mendeteksi ketidaksesuaian. Audit internal harus menjadi praktek rutin.

**Kerjasama dengan Auditor Independen:** Kerjasama dengan badan audit independen dapat memberikan perspektif objektif terhadap pengelolaan dana publik. Instansi pemerintah harus menjalin kemitraan yang kuat dengan badan-badan audit independen untuk mengaudit penggunaan dana secara teratur.

**Penerapan Sanksi Hukum yang Tegas:** Pemerintah harus menegakkan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku fraud sebagai tindakan pencegahan yang efektif. Hal ini akan menciptakan tekanan bagi pelaku fraud untuk menghindari tindakan ilegal.

**Pemberdayaan Masyarakat:** Instansi pemerintah harus mempromosikan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana publik melalui penyuluhan, pelatihan, dan pemberian

akses yang lebih mudah terhadap informasi. Masyarakat harus dianggap sebagai mitra dalam menjaga integritas pengelolaan dana publik.

Dengan mengikuti saran-saran ini, instansi pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, yang pada gilirannya akan membantu mencegah fraud dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Schick. (2016). *Public Financial Management and Its Emerging Architecture*. Oxford University Press.
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2011). *Fraud Examination (4th ed.)* (4 ed.). Mason.
- Bovens, M. (2007). *Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework 1*.
- Dimas Bayu. (2023). *ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022*.
- Hood, C. (2006). *Transparency in Historical Perspective*. Cambridge University Press.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Pearson.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2018). *OECD Principles of Corporate Governance*. OECD Publishing.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4 ed.). SAGE Publications, Inc.,
- Rahayu, F., Dina Ekasari, L., & mukoffi, A. (2021). Upaya Pencegahan Kecurangan Dalam Mengelola Dana Desa Sesuai Dengan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(2).  
<http://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/moneter>
- Stiglitz, J. E. (2002). *Information and the Change in the Paradigm in Economics*. Nobel Prize Lecture.
- SURVEI FRAUD INDONESIA. (2019).
- Transparency International. (2021). *Corruption Perceptions Index 2021*.
- Treviño, L. K., & Nelson, K. A. (2016). *Managing Business Ethics: Straight Talk about How to Do It Right*. John Wiley & Sons.
- Warren, M. E. (2014). The meaning of transparency. *Political Philosophy*, 22(3), 259–279.
- World Bank. (2020). *Trading for Development in the Age of Global Value Chains*.